

**PEMBANGGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2010-2012**

ABDURRAHMAN

Email: Rahmansiguen03@gmail.com

Pembimbing : Dr.KHAIRUL ANWAR, M.Si

Email :

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Abstrak

This study aimed to describe the role of local government in promoting development in the field of oil palm . The usefulness of this study is for information about the interaction of the crucial factors and determine the dominant factors that affect the implementation of government policy in increasing investment in oil palm . The method used in this study is qualitative methods of data that can not be expressed in terms of numbers but in the form of an explanation that describes the shape of the state , a process , a particular event . The technique of collecting data using interviews and documentation techniques .

From the research it can be concluded that the implementation of government policy in promoting investment in palm oil have a positive impact for the region , where investment will increase economic growth and create new job opportunities for the community , especially the local community . In addition to the steps - steps taken by the Government of intensive Pelalawan both in terms of rules and procedures that increasingly facilitated and preparation of supporting infrastructure such as roads and bridges , electricity and other government Pelalawan also always strive to promote the potential that exists territory in order interested investors to come and invest into Pelalawan

Keywords : Development , Policies , Investment

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses terencana dilakukan oleh golongan tertentu dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan kesejahteraan, menciptakan perdamaian. Ciri yang paling mendasar dalam pembangunan yakni direncanakan dan adanya campur tangan dari pihak tertentu. Kalau dalam negara pihak yang merancang konsep, melaksanakan, intervensi terhadap pembangunan yakni pemerintah dengan objek pembangunan masyarakat.

Perekonomian suatu daerah yang dimasuki oleh suatu investasi besar sudah bisa dipastikan akan berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah yang menjadi lokasi perusahaan besar seperti di daerah Riau yang berkembang pesat melalui investasi perusahaan perkebunan, pulp and paper, perusahaan HPH, dan lain-lain. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan sebagai penghasil minyak kelapa sawit (CPO- crude palm oil) dan inti kelapa sawit (CPO) yang merupakan salah satu sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit.

Investasi (penanaman modal) merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal maupun nasional. Upaya kegiatan penanaman modal di daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan diperlukan dalam rangka menunjang percepatan peningkatan pembangunan

ekonomi, meningkat kegiatan penanaman modal merupakan akselerator peningkatan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat menuju ekonomi bangsa yang mandiri. Dalam konsep pembangunan setiap daerah menginginkan suatu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah harus proaktif dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan ekonomi potensial di wilayahnya, baik yang berupa potensial sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.

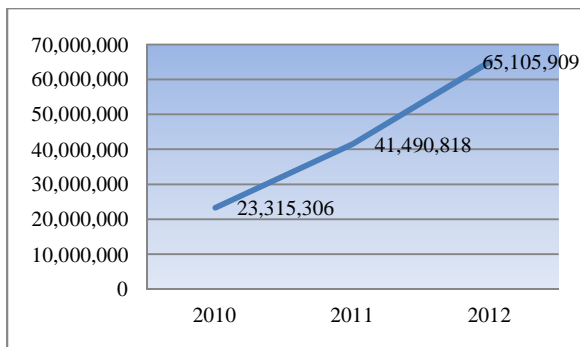
Dalam konsep pembangunan setiap daerah menginginkan suatu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Perkiraan terhadap pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah biasanya dilakukan untuk menentukan besarnya target produksi suatu sector usaha yang akan dicapai dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan kemampuan pembangunan dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Sejalan dengan era otonomi daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 3 UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 30 ayat 9 UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, maka ditetapkan peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah

daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal inilah yang menjadikan kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Atas dasar tersebut telah ditetapkan peraturan pemerintah No 45 tahun 2008 tentang pedoman dan kemudahan bagi penanaman modal di daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian daerahnya melalui kebijakan dalam menarik investasi.

Tabel 1.1 Grafik Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pelalawan 2010-2012



Sumber : BPMP2T Kabupaten Pelalawan

Pemerintah menyadari bahwa, mengandalkan investasi dari keuangan pemerintah saja tidaklah cukup untuk meningkatkan perekonomian, maka perlu peran investasi dari pihak swasta terutama dari dalam negeri (PMDN). Mengingat akan pentingnya modal, pemerintah selalu berusaha menarik minat para pengusaha domestik untuk menanamkan modalnya agar ikut

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pembangunan.

Penanaman modal sudah harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dengan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penanaman modal hanya dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi. Hal ini antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, harus adanya penciptaan birokrasi yang efisien disertai dengan kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi dan berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang itu, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Dan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah dengan dibentuknya lembaga atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal yang dilakukan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif di

Kabupaten Pelalawan. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya komunikasi yang intensif antara pelaku penanaman modal yang ada di wilayah ini dengan lembaga pemerintah yang terkait, dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal.

Sehingga dengan begitu, para penanam modal yang ada dapat mengetahui secara jelas mengenai aturan dan kebijakan penanaman modal itu sendiribaik berupa hak dan kewajibannya. Dengan kondisi tersebut maka akan tercapai iklim investasi yang kondusif di Provinsi Riau umumnya dan di Kabupaten Pelalawan khususnya. Sehingga dengan begitu, ke depan akan dapat tercapai iklim investasi yang kondusif.

Pada tahun 2010 luas areal perkebunan di Kabupaten Pelalawan telah mencapai 228.824,69 ha dengan jumlah produksi 549.969,70 ton.

Tabel 1.2 Potensi Pengembangan Perkebunan Tahun 2010-2012

Komoditas	2010	2011	2012
Karet			
<i>Luas Lahan (Ha)</i>	19.979,70	24.068,75	24.923,87
<i>Produksi (Ton)</i>	28.453,69	37.453,69	553.727,06
Kelapa			
<i>Luas Lahan (Ha)</i>	15.278,38	16.378,38	16.515,14
<i>Produksi (Ton)</i>	19.595,81	19.595,81	174.180,21
Kelapa Sawit			
<i>Luas Lahan (Ha)</i>	123.772,53	334.603,37	365.684,46
<i>Produksi (Ton)</i>	925.336,45	1.525.336,45	17.513.471,93

Sumber : Pemkab pelalawan 2013

Selain posisi wilayah yang strategis, ketersediaan lahan cukup luas,

daerah ini memiliki peluang investasi yang menjanjikan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan energi, serta pariwisata. Meskipun kekayaan sumber daya alam tersedia cukup melimpah, lokasi yang sangat strategis dan peluang pasar serta investasi terbuka sangat besar dan sebagainya, hal ini belum tentu dapat menjamin kepastian akan berkembangnya investasi di Kabupaten Pelalawan.

Perkembangan kegiatan perkebunan di Kabupaten Pelalawan menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan dan meningkatnya produksi rata-rata pertahun, dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Meskipun kekayaan sumber daya alam tersedia cukup melimpah, lokasi yang sangat strategis dan peluang

pasar serta investasi terbuka sangat besar dan sebagainya, hal ini belum tentu dapat menjamin kepastian akan berkembangnya investasi di Kabupaten Pelalawan.

Hal ini dapat disebabkan karena minimnya akses informasi mengenai potensi, keistimewaan dan kelebihan tersebut. Sehingga potensi itu akan tetap tinggal sebagai potensi yang belum termanfaatkan bagi daerah dan rakyat yang memilikinya. Apalagi pada saat ini persaingan didalam merebut masuknya investasi bukan hanya antar daerah dan provinsi, namun sudah antar negara. Namun, perkembangan suatu usaha di daerah juga ditentukan oleh kondisi dan iklim investasi. Kondisi dimaksud meliputi terciptanya keamanan, kepastian dan penegakan hukum, pemerintahan yang transparan dengan manajemen yang baik.

Melalui berbagai kegiatan-kegiatan misi promosi investasi yang terkoordinasi dan tersinkronisasi secara baik dan berkelanjutan, patut diharapkan untuk dapat meyakinkan kalangan dunia usaha, bahwa kondisi di Kabupaten Pelalawan cukup kondusif untuk berinvestasi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya fakta pelaksanaan kebijakan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit tahun 2010-2012 belumlah sesuai harapan sehingga mengindikasikan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal.

2. Karena minimnya akses informasi mengenai potensi, keistimewaan dan kelebihan tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :
Apa yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2012?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2012

Metode Penelitian

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Data-data yang didapatkan berupa data hasil wawancara kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pelalawan sebagai informan kunci dalam penelitian ini

Selain dari hasil wawancara juga digunakan dokumentasi yang diambil dari beberapa media online serta juga dilakukan dengan observasi atau pengamatan lapangan langsung dan juga dokumen-dokumen yang terkait dalam kebijakan ini. Dalam menganalisa data Kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap-orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow (1970) dari Amerika Serikat dan Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal output dalam rasio modal tenaga kerja.

Kebijakan investasi di Kabupaten Pelalawan juga diarahkan untuk dapat berperan dalam upaya penguatan infrastruktur dasar di Kabupaten Pelalawan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sebagainya memerlukan investasi yang sangat besar yang tidak mungkin hanya dibiayai dengan dana pemerintah. Investasi swasta sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tersedianya infrastruktur tersebut, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan selalu berupaya agar proyek-proyek strategis tersebut dapat diupayakan pelaksanaannya dengan menarik investasi swasta baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Selain langkah - langkah intensif yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Pelalawan baik itu dalam segi aturan-aturan serta prosedur yang makin dipermudah serta penyiapan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, listrik dan lain-lain, pemerintah Kabupaten Pelalawan juga selalu berupaya mempromosikan berbagai potensi yang ada di wilayahnya agar investor tertarik untuk datang dan berinvestasi ke Kabupaten Pelalawan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari besar kecilnya Produk Domestik Bruto (PDB) dan laju inflasi. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengandalkan kegiatan ekonomi jangka pendek dan usaha mengembangkannya dalam jangka panjang (Sukirno, 1999;55).

Dalam konsep pembangunan setiap daerah menginginkan suatu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Perkiraan terhadap pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah biasanya dilakukan untuk menentukan besarnya target produksi suatu sektor usaha yang akan dicapai dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan kemampuan pembangunan dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Dalam upaya mendorong tumbuh kembang sektor perkebunan di Riau, pemerintah tengah menyiapkan berbagai rencana, salah satunya dengan memasukkan Riau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI), Riau bakal diarahkan sebagai daerah sentra perkebunan nasional.

Berdasarkan data statistik yang disusun oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau pada 2012, Kabupaten Pelalawan memang masuk dalam daftar atas untuk investasi se-Riau. Kabupaten Pelalawan ada di peringkat tiga untuk realisasi investasi PMDN dengan investasi sebesar Rp833,89 miliar, sedangkan untuk realisasi investasi PMA ada di peringkat dua dengan investasi sebesar US\$225,78 juta. Adapun secara keseluruhan pada tahun lalu, realisasi investasi di Riau menembus angka Rp16 triliun. Angka tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,45 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$1,15 miliar.

1. Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, mempunyai sumber daya alam yang melimpah terutama disektor perkebunan khususnya komoditas andalan kelapa sawit, karet, dan kelapa.

Selain itu, juga terdapat beberapa industri besar dan sumberdaya manusia yang cukup berkualitas. Hal tersebut merupakan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumberdaya yang ada untuk membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Hal tersebut tentunya memerlukan dukungan dari semua komponen masyarakat/stakeholder baik menyangkut dukungan pikiran, tenaga maupun dana yang tentunya memerlukan kecermatan dalam pengelolaannya. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder dan tentunya sebagai agen pembangunan dituntut tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsinya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif - inisiatif bagi pembangunan daerah.

Dari data statistik perkebunan Kabupaten Pelalawan total produksi kelapa sawit tahun 2012 sebesar 17.513.471,93 ton, yang mengalami kenaikan 17x lipat dibandingkan produksi tahun 2011 sebesar 1.525.336,45 ton. Sentra-sentra perkebunan kelapa sawit tersebar hampir di semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan. (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan,2013)

Di beberapa perkebunan kelapa sawit bahkan telah banyak pabrik pengolahan CPO yang terintegrasi langsung dengan hasil perkebunannya.

Pola transmigrasi yang selama ini dilakukan juga ikut menyumbang produksi kelapa sawit. Masyarakat transmigrasi memperoleh lahan kelapa sawit untuk diolah dan juga bermitra langsung dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Untuk masa-masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, hal ini dapat dilihat dari data statistik diatas ini karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu akan diikuti oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS). Dari potensi yang ada, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi daerah Riau dan Kabupaten Pelalawan. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Jurnal Ilmiah Syahza,2003).

Dari sisi sumber daya alam ini, Kabupaten Pelalawan yang terletak di Provinsi Riau, dikelilingi oleh hutan kelapa sawit yang berlimpah. Provinsi Riau merupakan wilayah penghasil kelapa sawit nomor satu di Indonesia. 7 % hasil kelapa sawit tersebut juga dihasilkan oleh Kabupaten Pelalawan. Meskipun hasilnya relatif sedikit, namun potensi dari daerah sekitarnya juga mampu menjadi suplayer bahan baku industri kelapa sawit yang akan direncanakan akan menempati Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan.

Dipilihnya usaha perkebunan menurutnya didasari karena tersedianya sumber daya yang cukup. Hingga kini wilayah Kabupaten Pelalawan masih tersedia lahan terlantar yang cukup luas. Selain itu produk-produk kelapa sawit diprediksi semakin berkembang di masa mendatang. Apalagi pemanfaatan produk crude palm oil (CPO) sebagai sumber energi alternatif juga semakin luas.

Usaha perkebunan di daerah Pelalawan cukup menjanjikan. Melihat ini sebagai peluang yang baik untuk dikembangkan oleh Perusda ke depan produk-produk sawit kemungkinan akan semakin diminati pasar. Saat ini belum memutuskan lokasi yang akan dijadikan areal perkebunan. Namun sudah ada beberapa lokasi yang tengah dipelajari untuk dipilih yang terbaik.

2. Pembangunan Pabrik Kebun Sawit

Setelah pembangunan kebun kelapa sawit berhasil dilaksanakan, program berikutnya adalah pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang akan mengolah produksi tandan buah segar (TBS) menjadi CPO.

Permasalahan pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) dari segi bahan baku adalah belum terintegrasinya industri pemasok dengan industri inti, terkait dan pendukungnya. Dari segi infrastruktur permasalahannya adalah belum memadainya infrastruktur pendukung IHKS seperti pelabuhan, akses jalan, sarana transportasi, dan belum optimalnya pasokan bahan bakar.

Terbatasnya sumber dana pendukung kegiatan riset dan pengembangan teknologi IHKS, terbatasnya kemampuan di bidang

engineering dan manufacturing dan tingginya ketergantungan terhadap teknologi impor.

Jika Pemerintah Daerah tidak segera mengantisipasi hal ini, maka bisa jadi produk hilir kelapa sawit Pelalawan sulit berkembang dan kalah bersaing dengan produk hilir kelapa sawit dari negara lain yang salah satunya negara India yang mengimpor CPO. Merekalah yang akan menikmati nilai tambah terbesar dari kelapa sawit Riau.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Pelalawan, pemerintah pusat melalui BPPT telah menetapkan Kecamatan Langgam di Kabupaten Pelalawan, Riau ini sebagai salah satu kawasan industri hilir kelapa sawit di wilayah Sumatera dan telah diusulkan Kecamatan Langgam menjadi sebuah kawasan teknopolitan pertama di Sumatera. (Pemerintah Kabupaten Pelalawan)

3. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Proses Pembangunan Daerah

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan

paradigma baru di era globalisasi, IPTEK menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasis pada sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing daerah. (BPPT, 2011)

Memperhatikan pentingnya jejaring dalam sistem inovasi, maka dalam rangka pengembangan industri yang memberikan nilai tambah produk unggulan daerah yakni industri hilir kelapa sawit melalui sistem inovasi daerah diperlukan perencanaan dan pelaksanaan dalam membangun sistem inovasi daerah (SIDA) di provinsi Riau. Untuk dapat melakukan tujuan tersebut diperlukan perumusan kebijakan inovasi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi penyiapan pusat-pusat pengembangan dan penerapan IPTEK untuk mendukung implementasi MP3EI Koridor Sumatera berbasis SIDA.

Perkembangan Kabupaten Pelalawan yang cukup pesat tidak terlepas dari hadirnya perusahaan-perusahaan di daerah ini, baik itu perusahaan yang mengantongi izin penguasaan hutan tanaman industri (HTI) maupun izin hak guna usaha (HGU) perkebunan.

Izin usaha dan operasional yang mereka kantongi dari pemerintah pusat

menjadi bekal dan modal mereka mengeksploitasi bumi pelalawan, tidak peduli itu tanah perladangan padi dan kebun karet masyarakat, versi perusahaan itu adalah areal izin mereka..

Keadaan ini semakin diperparah dengan hilangnya mata pencaharian penduduk tempatan, mereka yang sebahagian petani tradisional ini, sekarang hanya tinggal kenangan, lahan dan hutan telah menjadi HGU (hak guna usaha) perkebunan dan HTI (hutan tanaman industri).

4. Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan

Dalam hal ini fungsi kebijakan sangatlah penting karena kebijakan merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Kawasan teknopolitan adalah suatu wilayah kota baru yang merupakan perpaduan sentra industri, sentra research and development, perguruan tinggi dan pemukiman seluas 100 hektare yang akan segera dibangun berbagai fasilitas infrastruktur, yakni kampus, pabrik-pabrik, pusat riset, pemukiman modern, fasilitas umum dan sebagainya.

Pembangunan kawasan teknopolitan industri hilir sawit sangat tepat untuk mendatangkan nilai tambah bagi komoditas. Sebabnya, selama ini Indonesia kehilangan neraca jam kerja akibat tidak ada industri hilir. Pembangunan teknopolitan di Pelalawan harus mengedepankan intervensi teknologi untuk kesuksesannya. Pencanaan kawasan Teknopolitan adalah sebuah lompatan besar karena Indonesia masih terus mengandalkan sumber daya komparatif karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah

Langkah MP3EI ini diharapkan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025 yang dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang mencerminkan karakteristik negara maju pada akhirnya diharapkan akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. (MP3EI, 2011)

Dalam upaya mendukung implementasi MP3EI Koridor Sumatera, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ditetapkan menjadi Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang dibangun berdasarkan komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan IPTEK yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan

tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi Provinsi Riau.

Dalam upaya mendorong tumbuh kembang sektor perkebunan di Riau, pemerintah tengah menyiapkan berbagai rencana, salah satunya dengan memasukkan Riau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Riau bakal diarahkan sebagai daerah sentra perkebunan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pembangunan merupakan suatu proses terencana dilakukan oleh golongan tertentu dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan kesejahteraan, menciptakan perdamaian. Ciri yang paling mendasar dalam pembangunan yakni direncanakan dan adanya campur tangan dari pihak tertentu. Kalau dalam negara pihak yang merancang konsep, melaksanakan, intervensi terhadap pembangunan yakni pemerintah dengan objek pembangunan masyarakat.

Upaya kegiatan penanaman modal di daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan diperlukan dalam rangka menunjang percepatan peningkatan pembangunan ekonomi, meningkat kegiatan penanaman modal merupakan akselerator peningkatan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat menuju ekonomi bangsa yang mandiri. Dalam konsep pembangunan setiap daerah menginginkan suatu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah harus proaktif dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan ekonomi potensial di wilayahnya, baik yang berupa potensial sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.

Investasi yang masuk dalam suatu daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dengan begitu maka dapat mengatasi pengangguran penduduk. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya dan proses perbaikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara implementasi otonomi daerah saat ini dihadapkan pada tantangan era globalisasi yang semakin berat.

Prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan dukungan tata kelola dan sinergi antara pusat dan daerah. Usaha untuk meningkatkan tata kelola dan sinergi pusat-daerah dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan

publik merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah. Desentralisasi yang dilaksanakan merupakan usaha untuk meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi di daerah. Seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi, dana-dana dari pusat, baik berupa dana perimbangan, dana dekonsentrasi maupun dana tugas perbantuan mengalir ke daerah, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Kinerja investasi Rp 229,9 triliun tersebut merupakan akumulasi realisasi penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), pada periode Januari–September 2012, PMDN mencapai Rp 65,7 triliun dan PMA mencapai Rp164,2 triliun.

Capaian kinerja investasi tersebut di atas, sesungguhnya menunjukkan indikator mulai berhasilnya berbagai upaya perbaikan iklim investasi yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi dan memberikan nilai tambah dan daya saing perekonomian nasional, di sisi lain, kinerja investasi menunjukkan meningkatkan kepercayaan dunia usaha kepada Indonesia, jumlah penduduk yang besar serta meningkatnya jumlah kelas menengah menjadi daya tarik utama bagi kegiatan investasi, disamping terus membaiknya makro ekonomi Indonesia.

Yang perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada

pembangunan perkebunan kelapa sawit antara lain :

1. Pengelolaan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.
2. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.
3. Meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Pelalawan.
4. Pembangunan kawasan Teknopolitan

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus lebih pro aktif meningkatkan investasi daerahnya terutama perkebunan kelapa sawit baik dari SDA maupun SDM-nya.
2. Pemerintah juga harus meningkatkan sumber-sumber lainnya dan menjaga stabilitas daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam pemberian izin lahan, pemerintah harus mengacu pada peraturan – peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Suryanto ,Adi (editor). 2008. *Manajemen Pemerinthan Daerah*. LAN : Jakarta
- AG.Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Syafaruddin, 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Suharto ,Edi, 2010, *Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public*, Bandung:Alfabeta.

Toha , Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Nugroho ,Rian. 2003. *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

_____ 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Dunn ,William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soegiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, LP3ES: Jakarta

Abidin , Zainal. 2002. *Kebijakan Publik* . Yayasan Pancur Siwah: Jakarta

Keban, Yeremis T. 1998. *Cara Pengukuran Variabl Penelitian*, UGM : Yogyakarta

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanaman Modal
Kabupaten Pelalawan

Media Online :

detikriau.net/**pelalawan**/519-p3a-
program-unggulan-**bpmp2t**

septri-

widiono.blogspot.com/2011/12/ke
lembagaan-kapital-sosial-
dan_05.html

[www.halloriau.com/read-pelalawan-
42203-2014-01-06-bpmp2t-
pelalawan-realisasikan-2490-izin-
di-2013.html](http://www.halloriau.com/read-pelalawan-42203-2014-01-06-bpmp2t-pelalawan-realisasikan-2490-izin-di-2013.html)

[www.goriau.com/berita/pelalawan/2013
-bpmp2t-pelalawan-realisasikan-
2460-izin.html](http://www.goriau.com/berita/pelalawan/2013-bpmp2t-pelalawan-realisasikan-2460-izin.html)

[m.riaupos.co/38769-berita-pengelolaan-
perizinan-sepenuhnya-di-bpmp2t
.html#.UtKvAtJdV_Q](http://m.riaupos.co/38769-berita-pengelolaan-perizinan-sepenuhnya-di-bpmp2t.html#.UtKvAtJdV_Q)

[www.riaupos.co/6396-daerah-berbagai-
hambatan-dan-kendala-di-
bpmp2t.html#.UtKvD9JdV_Q](http://www.riaupos.co/6396-daerah-berbagai-hambatan-dan-kendala-di-bpmp2t.html#.UtKvD9JdV_Q)